

Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Barang / Operasional Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui

Abdilla¹, Adriansyah²

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, laabdil48@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, uncudd@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Effectiveness and Efficiency of Budget Use, Budget Realization, Information Technology, Government Budget Policy

Received : 05 Juli 2024

Accepted : 29 November 2024

Published : 30 November 2024

The Serui Port Organizing Unit Office, as part of the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transportation, is a government entity that is obliged to carry out its duties with transparency, effectiveness, efficiency and professionalism. This research aims to investigate the effectiveness and efficiency of budget use at the Serui Port Organizing Unit Office (UPP Serui), the factors that influence it, as well as the impact of the use of information technology and government budget policies. The research method used is quantitative by analyzing data from UPP Serui's financial reports in a certain period. Descriptive analysis is used to evaluate budget allocations and expenditure realization, while regression analysis is used to identify factors that influence efficiency. The research results show that economic growth, political stability, and economic size have a significant influence on the effectiveness and efficiency of budget use, while inflation is not significant. Apart from that, government budget policy also plays an important role in determining the efficiency of budget use at the UPP Serui Office.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjadi landasan penyusunan dan pengelolaan anggaran di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Serui. Anggaran memiliki peran yang sangat penting dan menjadi panduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, karena berfungsi sebagai alat perencanaan yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi. Anggaran Kantor UPP Serui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN memuat daftar sistematis dan terperinci yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun (1 Januari – 31 Desember). APBN memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan negara, dan kesejahteraan rakyat, dengan pengelolaan yang efektif dan efisien sebagai salah satu kunci kesuksesan pembangunan suatu negara.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Suyono dan R. Agus (2019). Setiap pelaksanaan program dan kegiatan diukur dari aspek efektivitas sebagai tolok ukur kinerja, sementara efisiensi mengukur capaian dari program dan kegiatan tersebut dalam hubungannya dengan besaran penggunaan anggaran. Pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk optimalisasi sumber daya keuangan, peningkatan kinerja organisasi, transparansi, akuntabilitas, penghematan biaya, dan inovasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengukuran efisiensi penggunaan

anggaran di sektor publik, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Dimiyati (2016), memungkinkan instansi atau organisasi untuk mengalokasikan sumber daya finansial secara optimal. Dengan mengurangi pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu, sumber daya dapat dialokasikan lebih banyak untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran juga dapat dicapai melalui peningkatan kinerja organisasi, seperti yang dikutip dari Ernawati (2015), yang menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi yang baik dapat membantu mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efektif, serta meningkatkan pelayanan dan daya saing kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas, seperti yang disampaikan oleh Lestari Wulandari (2020), juga sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel, instansi atau organisasi dapat menggunakan dana secara lebih efektif dan efisien, sehingga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penghematan biaya juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, seperti yang dikemukakan oleh Made Suwira. Dengan mengidentifikasi faktor strategis penghematan biaya yang efektif, instansi atau organisasi dapat mengalokasikan lebih sedikit dana untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah, dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih strategis. Selain itu, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti yang disampaikan oleh Adisasmita R & Wibisono, A. (2019), juga diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan menghadapi tantangan di era modern.

Dengan mempertimbangkan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai pencapaian anggaran yang optimal, diperlukan alur pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Berikut adalah gambaran alur pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien:



Gambar 1 Alur Pengelolaan Anggaran

Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di UPP Serui akan memastikan pencapaian tujuan organisasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkelanjutan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah laporan realisasi anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui untuk periode 2021-2023, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan anggaran selama tiga tahun terakhir. Tujuan penulisan ini adalah mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi, serta mengembangkan metode atau indikator yang tepat untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi tersebut. Penulisan ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam praktik manajemen keuangan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui, serta memberikan solusi tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, beserta cara-cara untuk mencapainya.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif untuk menginvestigasi efektivitas dan efisiensi anggaran belanja operasional di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui, yang terletak di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Data utama dikumpulkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui dari tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, informasi tambahan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang kompeten dan melalui pencarian literatur dari sumber-sumber yang relevan.

Penetapan objek penelitian dilakukan secara cermat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui. Dalam proses pengumpulan data, pengamatannya meliputi proses kerja pegawai di kantor tersebut, serta gejala-gejala eksternal yang memengaruhinya. Melalui wawancara dengan pengguna jasa angkutan laut, peneliti bertujuan untuk memperoleh masukan terbuka yang meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Selain itu, studi ini juga melibatkan studi kepustakaan yang teliti, meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan pendekatan yang holistik dan beragam dalam pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja operasional di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui.

Hasil dan Pembahasan

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui menyelenggarakan fungsi diantaranya : Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan Kepentingan (DLKp), Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran sarana bantu navigasi pelayaran, Penjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, Pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan, Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta Pengelolaan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Data yang dianalisis ialah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui tahun 2021 – 2023 yang telah melalui pengawasan Inspektorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), adapun objek

penelitian ini hanya menganalisis efektifitas dan Efisiensi realisasi anggaran belanja operasional sebagaimana tabel tersebut dibawah ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Operasional Kantor UPP Serui

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran Operasional	Belanja	Realisasi Belanja	Sisa Anggaran
2021	Rp. 1.362.578.000,-		Rp. 1.353.753.002,-	Rp. 8.824.998
2022	Rp. 2.917.750.000,-		Rp. 2.536.044.920,-	Rp. 381.705.080
2023	Rp. 2.569.127.000,-		Rp. 2.518.289.900,-	Rp. 50.837.100

Sumber : Data Home Span DJKN

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran belanja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui selama 3 tahun mengalami perubahan naik turunnya anggaran belanja dimana pada tahun 2021 jumlah anggaran sebesar 1.362.578.000,-, lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.917.750.000, serta berikutnya pada tahun 2023 jumlah anggaran mengalami penurunan sebesar 2.569.127.000,-.

Faktor yang mempengaruhi naik turunnya anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui pada tahun 2021 yaitu adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan sebagian anggaran mengalami pengurangan dari pemerintah pusat yang mana anggaran tersebut digunakan untuk penanganan masalah Covid 19, pada tahun 2022 mengalami kenaikan anggaran dikarenakan adanya program dari pemerintah pusat untuk penyelesaian pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditujukan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 dan pada tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui kembali mengalami penurunan anggaran dikarenakan pemerintah telah mengubah status Pandemi menjadi Endemi dimana perekonomian nasional dianggap telah normal kembali dari gangguan Covid 19.

Dalam analisis anggaran belanja operasional, efektifitas tidak dilihat dari besaran biaya yang telah dikeluarkan, akan tetapi lebih kepada suatu program atau kegiatan yang telah dicapai sesuai tujuan yang ditetapkan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan. dimana program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai target yang ditentukan. Berdasarkan hasil dan pengamatan laporan realisasi anggaran belanja operasional Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui, bahwa untuk mengukur tingkat efektifitas penyerapan anggaran dengan presentase, dapat dihitung dari realisasi anggaran belanja dan anggaran belanja seperti rumus dibawah ini :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 1.353.753.002,-}}{\text{Rp. 1.362.578.000,-}} \times 100 = 99,35\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 2.536.044.920,-}}{\text{Rp. 2.917.750.000,-}} \times 100 = 86,79\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas Tahun 2023} = \frac{\text{Rp. 2.518.289.900,-}}{\text{Rp. 2.569.127.000,-}} \times 100 = 97,98\%$$

Hasil dari dari perhitungan rasio efektifitas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui dari tahun 2021 – 2023 dapat di lihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2. hasil perhitungan Rasio Efektifitas Penyerapan Anggaran Belanja Operasional Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran Operasional	Belanja Realisasi Belanja	Tingkat Efektifitas	Kriteria
2021	Rp. 1.362.578.000,-	Rp. 1.353.753.002,-	99,35%	Efektif
2022	Rp. 2.917.750.000,-	Rp. 2.536.044.920,-	86,79%	Efektif
2023	Rp. 2.569.127.000,-	Rp. 2.518.289.900,-	97,98%	Efektif

Sumber : Hasil Olahan dan Data Home Span DJKN

Dalam perhitungan tabel diatas, pengukuran rasio efektifitas dapat diketahui, jika semakin besar nilai rasio yang diperoleh makasemakin efektif kinerja anggaran pada suatu instansi atau organisasi. Pada tahun 2021 tingkat efektifitas anggaran belanja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui sebesar Rp. 99,35 %, dengan pagu anggaran belanja sebesar Rp. 1.362.578.000 dan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 1.353.753.002. Pada tahun 2022 tingkat efektifitas anggaran belanja mengalami penurunan menjadi 86,79 % namun anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.917.750.000 dan kenaikan realisasi belanjanya sebesar Rp. 2.536.044.920, jika dibandingkan dengan tahun 2021 presentase efektifitas mengalami penurunan tetapi anggaran mengalami kenaikan. Kemudian di tahun 2023 tingkat efektifitas anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 97,98 % tetapi alokasi anggaran mengalami penurunan sebesar Rp. 2.569.127.000 dan juga realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 2.518.289.900 namun presentase efektifitas mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis rasio efektifitas dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan dan penurunan pagu anggaran dan realisasi pada setiap tahunnya. Pengukuran efektifitas kinerja suatu instansi / organisasi bertujuan untu mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Adanya perubahan pada jumlah anggaran dan realisasinya dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan dari jumlah anggaran belanja negara, perbedaan anggaran dan realisasi belanja setiap tahunnya yang menggambarkan kinerja penyerapan anggarandalam suatu instansi organisasi, maka itu jumlah anggaran belanja dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan.

Efisiensi merupakan pengukuran kinerja suatu instansi / organisasi dengan membandingkan antara keluaran dan masukan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang sudah ditetapkan, apabila suatu produk atau karya tertentu menggunakan sumber dana yang serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien.

Dari hasil penilaian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui, diketahui tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja operasional yg diukur dari realisasi belanja langsung dengan Target anggaran belanja (pagu) sebagaimana rumus dibawah ini :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 1.353.753.002,-}}{\text{Rp. 1.362.578.000,-}} \times 100 = 99,35\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 2.536.044.920,-}}{\text{Rp. 2.917.750.000,-}} \times 100 = 86,79\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2023} = \frac{\text{Rp. 2.518.289.900,-}}{\text{Rp. 2.569.127.000,-}} \times 100 = 97,98\%$$

Tabel 3. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Operasional Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui.

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Langsung	Target Anggaran Belanja Operasional	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2021	Rp. 1.353.753.002,-	Rp. 1.362.578.000,-	99,35%	Tidak Efisien
2022	Rp. 2.536.044.920,-	Rp. 2.917.750.000,-	86,79%	Tidak Efisien
2023	Rp. 2.518.289.900,-	Rp. 2.569.127.000,-	97,98%	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Olahan dan Data Home Span DJKN

Dengan memperhatikan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui tidak efisien karena dalam pengukuran rasio efisiensi diketahui bahwa jika semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka semakin efisien kinerja anggaran pada suatu instansi / organisasi. Dengan diketahuinya tingkat efisiensi, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian realisasi anggaran belanja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui tidak sesuai dengan kriteria efisiensi yang telah ditetapkan karena berdasarkan hasil presentase rasio efisiensi pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui terdapat adanya kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 tingkat efisiensi anggaran belanja 99,35 %, pada tahun 2022 tingkat efisiensi mengalami kenaikan sebesar 86,79 %, dan pada tahun 2023 tingkat efisiensi mengalami penurunan sebesar 97,98 %. Rata – rata tingkat efisiensi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui pada tahun 2021 – 2023 dapat dikategorikan tidak efisien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektifitas dan efisiensi terhadap pengelolaan anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Tingkat Efektifitas penyerapan anggaran Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Serui tahun 2021 sebesar 99,35 % berada dalam kategori efektif, tahun 2022 sebesar 86,79 % berada dalam kategori efektif dan pda tahun 2023 tingkat efektifitas sebesar 97,98 % dan berada dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui dalam pencapaian realisasi anggaran belanja operasional telah efektif dalam merealisasikannya secara maksimal dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai target atau sasaran instansi / organisasi walaupun masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi setiap tahunnya, hal itu terjadi dikarenakan lokasi pelaksanaan kegiatan belanja berada di wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui yang jauh dan untuk mencapai lokasi tersebut dibutuhkan dukungan transportasi laut dan cuaca yang baik.
- b. Tingkat Efisiensi penyerapan anggaran Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Serui tahun 2021 sebesar 99,35 % berada dalam kategori tidak efisien, tahun 2022 sebesar 86,79 % berada dalam kategori tidak efisien dan pda tahun 2023 tingkat efektifitas sebesar 97,98 % dan berada dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui dalam pelaksanaan realisasi anggaran tidak efisien, hal ini terjadi dikarenakan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui terletak pada sebuah kepulauan yang mana akses orang maupun barang memerlukan biaya transportasi yang besar seperti pemesanan barang dari luar kota, perjalanan dinas pegawai yg memerlukan biaya transportasi yang mahal sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilaksanakan dengan efisien karena salah satunya tidak dapat dilakukan penghematan biaya dalam pengelolaan anggaran.

Referensi

- Adisasmita, R. Dan Wibisono, A. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Inovasi dan Efisiensi dalam Persaingan Global* Yogyakarta Penerbit Andi.
- Dimiyati, Muhammad. (2016). *Manajemen Anggaran Sektor Publik: Analisis Efisiensi dan Efektivitas*. Penerbit Salemba Empat.
- Ernawati. (2015). *Efektivitas Penggunaan Anggaran pada Lembaga Pemerintah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Hamid, Edy Suandi. (2018). *Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah*. Penerbit Pustaka Setia.
- Kurniawan, Andi. (2017). *Analisis Penggunaan Anggaran: Teori dan Praktik*. Penerbit Erlangga.
- Larso, Dwi. (2011). *Manajemen Keuangan Publik: Pengelolaan dan Analisis Penggunaan Anggaran*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 75).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1916).
- Sunyoto, R. Agus. (2019). *Manajemen Keuangan Pemerintah: Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran*. Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).